

**PENGARUH INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PROGRAM PEMBANGUNAN**

(Skripsi)

Oleh

TIARA AMALIA RAHMAYANI

NPM 2416041101



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Manfaat Penulisan.....	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam hubungan antara masyarakat dan lembaga publik. Saat ini, internet dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, serta YouTube menjadi saluran utama dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan tanggapan secara langsung dan real-time. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran penting dari pola komunikasi tradisional menuju komunikasi interaktif berbasis digital. Sejalan dengan perkembangan tersebut, laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024 menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221,56 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari populasi, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 229,43 juta jiwa dengan penetrasi 80,66%. Data dari *We Are Social/Hootsuite* (2024) juga mencatat bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari tiga jam setiap hari untuk menggunakan media sosial. Fakta ini menegaskan bahwa media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi telah menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari.

Bagi pemerintah daerah, media sosial kini memiliki peran strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (2002) yang menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan menekankan pada penggunaan strategi komunikasi yang efektif guna menyebarkan informasi, mengubah perilaku, serta mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam upaya kemajuan sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah kini semakin aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana strategis untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

Melalui akun resmi di berbagai platform, pemerintah dapat menyampaikan informasi terkait program pembangunan, regulasi, layanan administrasi, hingga pengumuman penting secara cepat dan praktis. Kehadiran media sosial juga mendukung terwujudnya prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Dengan kata lain, media sosial telah menjadi bagian penting dari strategi komunikasi publik pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Mannayong et al. (2024) menegaskan bahwa transformasi digital yang efektif melalui media sosial, forum daring, maupun aplikasi seluler tidak hanya memperluas jangkauan informasi pemerintah, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berkolaborasi dalam proses kebijakan.

Dalam konteks *e-government*, kualitas birokrasi dan kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan publik. Katharina (2020) menegaskan bahwa reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat. Sayangnya, kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sering dianggap kurang optimal, terutama di daerah, akibat birokrasi yang belum berjalan efektif. Oleh karena itu, transformasi digital melalui penerapan *e-government* sangat dibutuhkan untuk menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan adil. Pemanfaatan media sosial di tingkat daerah tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi secara teknis, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir birokrasi agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Publik kini dapat dengan mudah menyampaikan kritik maupun tuntutan melalui kanal digital, sehingga respons pemerintah yang lambat berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, media sosial tidak cukup hanya dijadikan sarana publikasi, tetapi harus diintegrasikan dengan sistem pelayanan publik yang partisipatif agar mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara nyata. Transformasi digital di daerah menuntut adanya komitmen dari para pemimpin untuk mendorong keterbukaan informasi. Pemimpin yang adaptif terhadap perkembangan teknologi akan lebih mudah membangun komunikasi dengan masyarakat melalui gaya kepemimpinan yang inklusif.

Dalam konteks pembangunan, kepemimpinan digital berperan penting untuk mempercepat penyampaian informasi, memperluas jangkauan sosialisasi program, serta membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dengan cara ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi publik, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengoptimalkan media sosial. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan budaya birokrasi menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi *e-government* di tingkat lokal. Ada daerah yang berhasil menggunakan media sosial untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, sementara daerah lain hanya menjadikannya sebagai saluran pengumuman tanpa interaksi berarti.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas media sosial sebagai instrumen *e-government* sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menjadikannya sebagai ruang komunikasi timbal balik yang sehat dengan warganya. Partisipasi masyarakat merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Partisipasi tidak hanya berarti kehadiran warga dalam forum, tetapi mencakup keterlibatan aktif mereka dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi melalui media sosial diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat untuk lebih terlibat. Namun, kenyataannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih belum optimal. Banyak warga hanya berperan sebagai konsumen informasi tanpa benar-benar terlibat dalam diskusi publik, konsultasi kebijakan, atau pelaksanaan program. Tantangan utama yang sering muncul antara lain rendahnya literasi digital, kurangnya kesadaran mengenai pentingnya partisipasi, serta minimnya mekanisme umpan balik yang efektif dari pemerintah.

Penelitian Fajrilla (2025) menegaskan bahwa meskipun media sosial cukup efektif dalam menyebarkan informasi, tingkat keterlibatan masyarakat tetap sangat dipengaruhi oleh motivasi dan kepedulian mereka terhadap isu publik. Dengan demikian, kualitas partisipasi masyarakat harus dilihat bukan hanya dari kuantitas kehadiran, tetapi dari sejauh mana mereka aktif menyampaikan ide, memberikan masukan, dan berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat yang ideal bukan hanya diukur dari jumlah kehadiran dalam forum, tetapi dari sejauh mana warga aktif menyampaikan ide, memberi masukan, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program.

Kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering kali masih bersifat dangkal. Banyak warga hanya mengikuti informasi tanpa benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam bentuk ide maupun tindakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi partisipasi yang ditawarkan media sosial dengan realitas keterlibatan publik yang rendah. Situasi ini semakin rumit karena tidak semua kelompok masyarakat memiliki literasi digital yang memadai, sehingga sebagian tertinggal dalam proses transformasi digital. Selain itu, faktor kepercayaan publik terhadap pemerintah juga berpengaruh besar. Ketika masyarakat merasa pendapat mereka tidak direspons atau ditindaklanjuti, mereka cenderung pasif dan enggan terlibat kembali. Sebaliknya, jika pemerintah cepat memberikan respon yang jelas dan transparan, partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Oleh sebab itu, media sosial tidak seharusnya hanya digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, melainkan harus difungsikan sebagai ruang dialog yang memberi makna nyata bahwa suara masyarakat dihargai dalam proses pembangunan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara penggunaan media sosial pemerintah daerah dengan keterlibatan nyata masyarakat. Kesenjangan ini menjadi alasan pentingnya penelitian untuk mengetahui sejauh mana informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah benar-benar mampu mendorong partisipasi warga. Pemerintah daerah perlu memahami efektivitas strategi komunikasi digital agar tidak berhenti pada penyebaran informasi, tetapi juga dapat mendorong tindakan nyata masyarakat. Umayasari dan Amantha (2025) menegaskan bahwa partisipasi publik akan meningkat apabila masyarakat merasa pendapatnya dihargai dan pemerintah cepat memberikan respon atas masukan yang disampaikan melalui platform digital.

Lebih jauh, kesenjangan antara ketersediaan informasi dan keterlibatan nyata masyarakat dalam pembangunan sering kali disebabkan oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, pola komunikasi pemerintah daerah di media sosial masih cenderung bersifat satu arah (*top-down*), sehingga masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima informasi, bukan mitra aktif. Kedua, mekanisme umpan balik yang ada sering kali tidak ditindaklanjuti secara transparan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh nyata pada pengambilan keputusan. Ketiga, adanya perbedaan sosial-ekonomi dan literasi digital juga turut memengaruhi tingkat keterlibatan, di mana kelompok dengan keterbatasan akses teknologi lebih sering menjadi penonton pasif, sementara kelompok yang lebih melek digital cenderung lebih aktif dalam memberikan masukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Jika pola komunikasi satu arah terus dibiarkan, media sosial berisiko hanya menjadi etalase pencitraan pemerintah tanpa menyediakan ruang dialog yang bermakna.

Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi semu dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan program. Dalam jangka panjang, hal ini bahkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi digital yang lebih inklusif dan interaktif. Masyarakat tidak hanya diajak untuk mengetahui program pembangunan, tetapi juga dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, media sosial dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Kehadiran media sosial seharusnya tidak lagi dipahami sekadar sebagai alat publikasi, melainkan sebagai ruang bersama yang menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah yang mampu mengoptimalkan peran media sosial akan lebih mudah membangun komunikasi transparan, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan di mata warga. Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan antara media sosial pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat memiliki urgensi baik secara akademis maupun praktis.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan erat antara motivasi, kinerja, dan akuntabilitas dalam mendorong partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan temuan Yuana dkk. (2025) yang menegaskan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi dan kinerja pegawai, di mana transparansi dan akuntabilitas mampu memperkuat komitmen serta meningkatkan efektivitas kerja aparatur publik. Dalam konteks ini, informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat berfungsi sebagai faktor pendorong (motivasi) bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat kemudian menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam melibatkan publik, sedangkan akuntabilitas pemerintah menjadi penentu apakah partisipasi tersebut benar-benar bermakna.

Motivasi masyarakat untuk berpartisipasi tidak muncul secara otomatis, tetapi dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, motivasi cenderung tumbuh ketika pembangunan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Dari sisi eksternal, motivasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan iklim komunikasi yang terbuka dan inklusif. Apabila masyarakat merasa bahwa suara mereka dihargai, maka mereka akan lebih terdorong untuk ikut serta secara aktif.

Kinerja pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Informasi pembangunan yang disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui bagaimana proses pembangunan dijalankan, siapa yang terlibat, serta apa dampaknya. Pemahaman yang baik mengenai alur pembangunan akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan yang lebih besar.

Selain kinerja, akuntabilitas pemerintah juga menjadi faktor krusial. Akuntabilitas yang tinggi membuat masyarakat yakin bahwa keterlibatan mereka bukan formalitas semata, melainkan benar-benar berpengaruh terhadap kebijakan. Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas akan menurunkan partisipasi karena masyarakat merasa masukan mereka tidak membawa perubahan nyata. Dengan demikian, motivasi, kinerja, dan akuntabilitas merupakan tiga komponen yang saling terkait dalam membangun partisipasi masyarakat. Media sosial dapat menjadi katalis yang memperkuat hubungan ketiganya, asalkan pemerintah daerah mampu menggunakannya secara efektif sebagai sarana interaksi dan pengawasan publik.

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Misalnya, masyarakat adat di Papua, seperti di Kabupaten Tolikara, memiliki karakteristik sosial yang homogen dan tingkat ketergantungan tinggi pada pemerintah. Hal ini membuat partisipasi mereka dalam pembangunan cenderung pasif dan terbatas. Hambatan lain yang muncul adalah ketidakseimbangan informasi, budaya patron-klien, serta rendahnya kapasitas pendidikan (Sitorus et al., 2023). Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa karakteristik sosial budaya berperan penting dalam menentukan tingkat keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, terdapat contoh praktik baik pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Surabaya secara aktif menggunakan Instagram dan Twitter untuk menyebarkan informasi mengenai program kebersihan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui akun resmi “@jabarprovgoid” juga konsisten membagikan informasi pembangunan sekaligus membuka ruang diskusi publik.

Meskipun demikian, tingkat keterlibatan masyarakat masih bervariasi. Sebagian warga merespons dengan antusias, sementara yang lain hanya menjadi penonton pasif. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konteks sosial dan budaya di setiap daerah sangat memengaruhi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi pemerintah daerah melalui media sosial harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat agar pesan pembangunan lebih mudah diterima dan direspons. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai komunikasi politik, tata kelola pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi teoritis untuk mengisi celah literatur yang masih terbatas terkait efektivitas media sosial pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi publik.

Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi nyata bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan media sosial secara lebih efektif. Dengan strategi komunikasi yang tepat, media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, di mana transparansi dan partisipasi publik menjadi aspek utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi aplikatif untuk meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini relevan baik secara teoritis untuk pengembangan ilmu administrasi publik maupun secara praktis bagi peningkatan strategi komunikasi pemerintah daerah di era digital.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, jelas bahwa media sosial memiliki potensi besar sekaligus tantangan dalam mendorong partisipasi masyarakat. Di satu sisi, media sosial mampu memperluas akses informasi, membuka ruang diskusi, dan memperkuat transparansi. Namun di sisi lain, tanpa strategi komunikasi yang tepat, media sosial berisiko hanya menjadi saluran formalitas yang tidak meningkatkan keterlibatan nyata. Inilah yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan, guna memahami sejauh mana informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah benar-benar mampu memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana komunikasi publik pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara banyaknya informasi yang disebarkan dengan rendahnya keterlibatan nyata masyarakat. Penelitian terdahulu tentang motivasi, kinerja, dan akuntabilitas juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh sejauh mana informasi tersebut mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh informasi melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik, sekaligus manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi komunikasi digital yang lebih efektif, dialogis, dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi media sosial, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan inklusif, sehingga sejalan dengan prinsip *good governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan?
2. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas informasi pemerintah daerah di media sosial memengaruhi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif?
3. Faktor-faktor apa yang memperkuat atau menghambat efektivitas media sosial pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.
2. Menjelaskan bagaimana transparansi dan akuntabilitas informasi pemerintah daerah di media sosial memengaruhi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat atau menghambat efektivitas media sosial pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi publik.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya mengenai komunikasi pemerintahan digital, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Memperkaya literatur mengenai pengaruh media sosial pemerintah daerah terhadap keterlibatan publik dalam program pembangunan.

b. Manfaat Praktis

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif. Memberikan rekomendasi strategi komunikasi digital yang dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.

c. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya

Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang menyoroti hubungan media sosial, partisipasi masyarakat, dan prinsip *good governance* dalam konteks pembangunan daerah. Mendorong penelitian perbandingan antar daerah atau antar platform media sosial untuk mengetahui perbedaan efektivitas dalam meningkatkan partisipasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, 7 Februari). APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. Diakses pada [tanggal akses], dari https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang?utm_source
- Fajrilla, C. (2025). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui sosialisasi media sosial. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 5(1), 30–38. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- Katharina, R. (Ed.). (2020). *Pelayanan publik dan pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mannayong, J., Rizal, M., Herling, & Faisal, M. (2024). Transformasi digital dan partisipasi masyarakat: Mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 51–72. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.260>
- Nasution, Z. (2002). *Komunikasi pembangunan: Pengenalan teori dan penerapannya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, A. D. (2024, 21 Februari). Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024. Diakses pada [tanggal Anda mengakses], dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>
- Sitorus, Y. L. M., Usman, S., & Yanthy, N. O. (2023). *Perencanaan pembangunan partisipatif pada penduduk asli*. CV Mega Press Nusantara.
- Umayasari, U., & Amantha, G. K. (2025). Partisipasi warga melalui media digital dan implikasinya terhadap akuntabilitas serta perumusan kebijakan pemerintah daerah di Lampung. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2(1), 109–124. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/index>
- Yuana, I., Sabilalo, M. A., Fauzih, & Halim, A. I. M. (2025). Leadership, governance, and organizational environment as determinants of

employee motivation and performance in a public sector institution.
Society, 13(1), 520–537. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.820>